

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta dan daya saing. Kebijakan ini menuntut kinerja dan peran pemerintah daerah yang optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah dalam bidang keuangan adalah melalui penyediaan dana perimbangan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Adapun salah satu pemberian dana perimbangan dengan maksud untuk membiayai sektor tertentu dapat dilakukan melalui DAK. Untuk alokasi DAK terbagi menjadi dua kategori yakni DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik. Peraturan Keuangan 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan definisi DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Total Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2019 yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar **Rp.207.976.810.000,-** dengan rincian DAK fisik sebesar **Rp.122.133.480.000,-** dan DAK non fisik sebesar **Rp.85.843.330.000,-**.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DAK perlu disertai dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 9 ayat 1 Perpres Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Dalam ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan per triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berakhir kepada kementerian terkait, Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Laporan DAK juga disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai wujud koordinasi serta sinkronisasi kegiatan pembangunan.

1.2 TUJUAN PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kobar bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Triwulan II Tahun 2019 di Kabupaten Kobar;
2. Sebagai pembanding dan tolok ukur capaian kinerja Pemkab Kobar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Fisik maupun Non Fisik;
3. Menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2019 serta upaya-upaya tindak lanjut/solusi yang perlu ditempuh untuk mempercepat penyerapan fisik dan keuangan pada triwulan selanjutnya;
4. Mengontrol tingkat serapan anggaran agar sesuai target yang telah ditetapkan dan mengantisipasi potensi kegagalan pelaksanaan kegiatan;
5. Bahan pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB II
HASIL PELAKSANAAN DAK

2.1 MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

Total Pagu seluruh Bidang Rp. 122.133.480.000,-

Terdiri dari 13 bidang. DAK Fisik disalurkan melalui 3 tahap:

- Tahap I : 25% dari pagu.
- Tahap II : 45% dari pagu
- Tahap III : Selisih antara total kontrak per bidang dengan dana yang sudah disalurkan pada tahap I dan II.

Misal: Total pagu 1.000.000.000,- dengan nilai kontrak 900.000.000,- maka tahap I sebesar 250.000.000,- tahap II sebesar 450.000.000 dan tahap III sebesar 200.000.000,-.

Batas akhir input kontrak di aplikasi omspan tanggal 21 Juli 2019. Karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka batas inputnya jatuh pada hari kerja berikutnya yakni pada 22 Juli 2019.

DAK Fisik disalurkan berdasarkan Nilai Kontrak bukan Nilai Pagu. Sehingga apabila sampai dengan batas waktu tersebut terdapat kegiatan yang kontraknya belum diinput di aplikasi OMSPAN, maka konsekuensinya adalah kegiatan **tersebut tidak dapat didanai dengan DAK.**

TABEL 2.1 Realisasi Kontrak DAK FISIK per 18 Juli 2019

NO.	URAIAN	PAGU	KONTRAK YANG SUDAH DISETUIJUI DI OMSPAN	SISA PAGU	KETERANGAN
1	Reguler Bidang Pendidikan	24.272.773.000,00	15.582.571.369	8.690.201.631	Belum
2	Reguler Bidang Kesehatan dan KB	7.262.084.000,00	2.008.494.349	5.253.589.651	Belum
3	Reguler Bidang Air Minum	1.918.797.000,00	1.918.797.000	-	Ok
4	Reguler Bidang Sanitasi	2.749.583.000,00	2.749.583.000	-	Ok
5	Reguler Bidang Pertanian	2.729.536.000,00	2.049.631.350	679.904.650	Belum
6	Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1.136.063.000,00	1.116.333.000	19.730.000	Ok
7	Reguler Bidang Pariwisata	2.851.545.000,00	2.733.913.930	117.631.070	Ok
8	Reguler Bidang Jalan	29.677.837.000,00	29.677.836.500	500	Ok
9	Penugasan Bidang Kesehatan	45.917.669.000,00	44.434.303.557	1.483.365.443	Dinkes Blm, RSUD Ok
10	Penugasan Bidang Air Minum	500.000.000,00	493.237.000	6.763.000	Ok
11	Penugasan Bidang Sanitasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000	-	Ok
12	Penugasan Bidang Pasar	1.625.959.000,00	1.384.694.000	241.265.000	Ok
13	Penugasan Bidang LHK	491.634.000,00		491.634.000	Belum
	TOTAL	122.133.480.000,00	105.149.395.055,00	16.984.084.945,00	86,09%

Keterangan:
Data per 18 Juli 2019, 11.25 WIB

2.2 REALISASI PELAKSANAAN DAK

Realisasi kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Triwulan II (Ub. Per 30 Juni) Tahun Anggaran 2019 secara umum masih sangat rendah. Untuk DAK Fisik dan Non Fisik, realisasi fisik dan keuangan sudah ada peningkatan meski belum memenuhi target. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan secara rincian adalah sebagai berikut :

- a. Total realisasi DAK Fisik per 30 Juni yakni fisik mencapai 23,20% atau meningkat 11,12% jika dibandingkan Triwulan I yang hanya **5,94%**. Untuk realisasi keuangan 6,07 % atau sama dengan capaian Triwulan I. Meski demikian, realisasi fisik dan keuangan DAK Fisik belum memenuhi target Triwulan II yakni 50% fisik dan 50% keuangan;
- b. Total realisasi DAK Non Fisik yakni fisik mencapai 42,23% dan realisasi keuangan yang terserap sebesar 23,27% dan meningkat jika dibandingkan Triwulan I yang masih **0%**. Meski terdapat peningkatan, secara umum capaian fisik dan keuangan DAK Non Fisik masih belum mencapai target minimal yakni 50 % Fisik dan 50 % Keuangan.

2.3 REALISASI PER BIDANG DAK FISIK DAN NON FISIK

2.2.1 REALISASI DAK FISIK

Rincian realisasi fisik dan keuangan (RFK) DAK Fisik dan Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. DAK BIDANG PENDIDIKAN

DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar Rp.24.272.773.000,- dengan rincian DAK Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebesar Rp. 23.088.273.000,- dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Rp. 1.184.500.000,- Untuk capaian sampai dengan Triwulan II, realisasi fisik 4,10% dan keuangan masih 0%. Sedangkan untuk DPK realisasi fisik 83,93 % dan keuangan masih 0 %.

2. DAK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Total pagu DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Rp.8.932.430.000,- dengan rincian DAK Fisik Sub Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan mendapat pagu sebesar Rp.7.698.583.000,- dan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) Dinas P3AP2KB sebesar Rp.1.233.847.000,-. Sampai dengan triwulan II T.A 2019, realisasi DAK Fisik Sub Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan capaian fisik 30,58 % dan keuangan masih 0%. Sedangkan capaian

DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB realisasi fisik 32,46% dan keuangan 0% atau sama dengan Triwulan I.

3. DAK BIDANG JALAN

Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan Dinas PUPR Rp.29.677.837.000,-. Sampai dengan triwulan II, realisasi fisik mencapai 64,17 % dan keuangan 25 %.

4. DAK BIDANG AIR MINUM

Alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum Dinas PUPR sebesar Rp.2.418.797.000,-. Sampai dengan triwulan II, realisasi fisik mencapai 6,31 % dan keuangan masih 0%.

5. DAK BIDANG SANITASI

Alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi Dinas PUPR Rp.3.749.583.000,-. Sampai dengan triwulan II, realisasi fisik 0,82% dan keuangan masih 0%.

6. DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi DAK Fisik bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.491.634.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih 0%.

7. DAK BIDANG PASAR

Alokasi DAK Fisik bidang pasar Dinas Perindagkop dan UKM sebesar Rp.1.625.959.000,- dengan realisasi fisik 1,73% dan keuangan masih 0%.

8. DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alokasi DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan Dinas Perikanan sebesar Rp.1.136.063.000,- dengan realisasi fisik 5,28 % dan keuangan masih 0%.

9. DAK BIDANG PARIWISATA

Alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata sebesar Rp.2.851.545.000,- yang terdiri dari DAK Murni Rp.2.708.967.750,- dan dana penunjang Rp.142.577.250,-. Untuk realisasi fisik mencapai 42,42% dan keuangan masih 0%.

10. DAK BIDANG PERTANIAN

Alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Dinas TPHP sebesar Rp.2.729.536.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih 0%.

11. DAK BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG RS RUJUKAN DAN PRATAMA

DAK Fisik Sub Bidang Rumah Sakit (RS) Rujukan dan Pratama RSUD Sultan Imanuddin sebesar Rp.44.247.323.000,- dengan realisasi fisik 9,24 % dan keuangan masih 0 %.

2.2.2 REALISASI DAK NON FISIK

1. DAK BIDANG PENDIDIKAN

Adapun alokasi DAK Non Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp.62.922.798.000,- dengan realisasi fisik 45,82% dan keuangan 21,79%.

2. DAK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Adapun pagu untuk DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.20.851.332.000,- dengan realisasi fisik 32,61% dan keuangan masih 27,96 %.

3. DAK BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Untuk alokasi DAK Non Fisik Bidang Kependudukan sebesar Rp.959.030.000,- dengan realisasi fisik 21,58% dan keuangan masih 15,89%.

4. DAK BIDANG PASAR

Untuk alokasi DAK Non Fisik Bidang Pasar sebesar Rp.358.000.000,- dengan realisasi fisik 30% dan keuangan 10,83%.

5. DAK BIDANG PARIWISATA

Untuk alokasi DAK Non Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp.752.170.000,- dengan realisasi fisik 41,33% dan keuangan 31,94%

BAB III

PERMASALAHAN DAN KENDALA

PELAKSANAAN DAK

3.1 UMUM

Realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sudah mulai berjalan meski persentasenya masih sangat rendah. Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Realisasi fisik dan keuangan TW II belum mencapai target minimal yakni 50% fisik dan 50% keuangan;
- b. Keterlambatan dalam proses tender di ULP karena masih menunggu proses tayang di e-katalog;
- c. Petunjuk teknis/aturan terkait dengan pelaksanaan DAK dari pemerintah pusat/kementerian yang berubah-ubah sehingga menyulitkan SKPD dalam melakukan penyesuaian mengingat waktu yang tersisa sangat singkat.
- d. Terdapat syarat tambahan berupa reviu dari Inspektorat yang menghambat percepatan realisasi fisik dan keuangan
- e. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung kepada pemerintah pusat/provinsi;

Adapun permasalahan secara spesifik per bidang kegiatan tersaji pada tabel di bawah ini.

**TABEL PERMASALAHAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN DAK NON FISIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN (T.A) 2019**

A. TABEL KENDALA/SOLUSI DAK FISIK

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan	- Sub Bidang DAK SMP	Secara umum, permasalahan pada aplikasi LKPP untuk e-katalog buku masih error	Menunggu perbaikan aplikasi
			- Sub Bidang DAK SD		
			- Sub Bidang DAK PAUD		
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Pendidikan	- Pengadaan peralatan/perlengkapan perpustakaan	Secara umum tidak ada masalah	Proses menunggu transfer dari pusat dan administrasi realisasi keuangan
3.	Dinas Kesehatan	Bidang DAK Kesehatan	- Sub Bidang Pelayanan Dasar	- Paket pengadaan mobil roda empat single gardan belum muncul di LPSE - Paket pengadaan mobil roda empat double gardan masih negosiasi harga (e katalog) - Pengadaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Labkesda sudah tayang di LPSE namun belum ada peminat	
			- Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	-	-

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
			- Sub Bidang Pelayanan Penugasan (Pengendalian Penyakit)	- Pengadaan Cryoterapi dengan pagu Rp 544.187.266,- tidak dapat terealisasi karena ditolak Kementerian Kesehatan dengan alasan yang boleh mengusulkan hanya Rumah Sakit (Bukan Dinas)	- Sebagai bahan evaluasi perencanaan DAK Tahun berikutnya
			- Sub Bidang Pelayanan Penurunan Stunting	-	-
4.	Dinas P3A, DALDUK KB	Bidang KB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proses di KPPN telah selesai namun sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 dana DAK belum masuk ke Kas Daerah sehingga belum dapat mengajukan SPD.	Selalu berkoordinasi dengan BPKAD Kab.Kobar
			Peningkatan Sarpras Aparatur		
			Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		
			Prortam Pelayanan Kontrasepsi		
5.	Dinas PUPR	Bidang Jalan	Peningkatan Jalan	-	-
		Bidang Air Minum	Pengembangan Distribusi Air Minum	Proses lelang dan penandatanganan kontrak baru selesai di bulan juni	Mempercepat pelaksanaan fisik di lapangan
		Bidang Sanitasi	Kegiatan Penyediaan Sarpras Air Limbah	Pelaksanaan di Lapangan masih menunggu proses pencairan Tahap I (25%) karena sesuai Juknis di laksanakan secara Swakelola	Melengkapi Administrasi sebagai syarat pencairan Tahap I (pertama)

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
			Pembuatan Sanitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-
			Pembuatan Prasarana Tangki Septik Individual	-	-
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan	Pengadaan Dump Truck	Baru memasukkan berkas untuk lelang cepat pada 16 Juli 2019 karena belum terbit harga 2019 LKPP (e-katalog atau e-purchasing) untuk Dump Truk Sampah yang sesuai spesifikasi Juknis dimaksud.	Memaksimalkan sisa waktu untuk mengejar batas waktu kontrak dan input ke OMPSAN pada 22 Juli mendatang jam 17.00 WIB
7.	Disperindagkop UKM	Bidang Pasar	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat Tipe D	Dalam tahap masa sanggah	-
8.	TPH Perkebunan	Bidang Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian. Ada tiga paket kegiatan dengan total Rp. 679.904.650,- yang tidak bisa dilaksanakan terdiri dari :		
			1. Rehab kantor BPP Kecamatan Pangkalan Banteng	Kondisi kantor BPP Kecamatan Pangkalan Banteng perlu rehab total. Namun, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk rehab ringan	Perencanaan ke depan harus lebih matang
			2. Pembangunan Tampungan Air di Desa Marga Mulya	Overlap dengan kegiatan Dinas PUPR dimana Dinas PUPR di lokasi yang sama membangun bendungan yang lebih besar.	Perencanaan ke depan harus lebih matang

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
			3. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Di Desa Natai Baru	Di tunda karena mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Dalam Juknis, JUT merupakan upaya mengatasi masalah di sentra produksi pangan. Sedangkan di lokasi tapak proyek tidak ada aktivitas pangan	Perencanaan ke depan harus lebih matang
9.	Dinas Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	4. Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan	-	-
			- Kajian tempat pelelangan ikan	Perubahan jenis pekerjaan pada pekerjaan Kajian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) awalnya jasa lainnya	Telah dirubah jenis pekerjaannya menjadi Jasa Konsultansi dan proses lelang
			5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan	-	-
			- Perencanaan pembuatan kapal 3 GT (DAK)		
			- Pengawasan pembuatan kapal 3 GT (DAK)		
			- Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan 10 unit (DAK)	Perbaiki KAK dan segera diinput ulang ke aplikasi LPSE agar tertanggal 28 Mei 2019 bisa tayang ulang, mengingat waktu terbatas	Menunggu proses lelang ke tiga

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
10.	Dinas Pariwisata	Bidang Pariwisata	1. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet (Desa Keraya)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			2. Pembuatan Pergola (Sabuai Timur)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			3. Pemasangan Lampu Taman (Sebuai Timur)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			4. Pembuatan Pagar Pembatas (Kubu)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			5. Pembuatan Gazebo (Desa Kumpai Batu Atas)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
			6. Pembuatan panggung kesenian/pertunjukan (Desa Kumpai Batu Atas)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			7. Pembangunan menara pandang (view deck) (kumpai batu atas)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			8. Pembangunan gapura identitas (kumpai batu atas)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			9. Pembuatan jalur pejalan kaki/pedestrian (kubu)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
			10. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik pariwisata	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
			11. Pembangunan Dermaga Wisata (sebuai timur)	Sedang Proses Permintaan Nomor dan Tanggal SPD ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kobar untuk penyerapan anggaran DAK Fisik Tahap Pertama.	Mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan
11.	RSUD	Bidang Rujukan	Pembangunan gedung Instalasi Hemodialisa (HD/cuci darah)	Dalam proses tender	-
			Pengadaan alat kedokteran umum	-	-
			Pengadaan Prasarana Kesehatan (UPS)	-	

B. TABEL KENDALA/SOLUSI DAK NON FISIK

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan	- BOP PAUD	-	-
			- Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-
			- Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-
			- Tunjangan Khusus Guru PNSD	-	-
			- BOP Pendidikan Kesetaraan		
2.	Dinas Kesehatan	Bidang DAK Kesehatan	- Bantuan Operasional	-	-
			- Jaminan Persalinan	-	-
			- Akreditasi	-	-
			- Dukungan Manajemen	-	-
3.	Dinas P3AP2KB	Bidang Operasional KB (BOKB)	- Pelayanan Kontrasepsi	-	-
			- Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	-
			- Pengendalian Penduduk	-	-
4.	Dinas Perindagkop UKM	Bidang Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	Pelatihan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah	- Kegiatan pelatihan PK2UKM di dilaksanakan pada bulan Juni, Agustus dan Oktober	-

No.	Dinas/Badan	Bidang DAK	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi Tindak Lanjut
5.	Dinas Pariwisata	Pelayanan Kepariwisataa	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-
			Pengembangan Kemitraan	-	-
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DAK Non Fisik Bidang Administrasi Kependudukan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Belum Ada Jadwal Bimtek dari Provinsi	melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Provinsi
			Pelayanan Keliling Pendaftaran	Belum ada Surat permintaan pelayanan administrasi kependudukan	akan menjadwal untuk segera melaksanakan pelayanan dengan inisiatif dinas
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	Belum Anggaran Kas	1. Narasumber telah dihubungi 2. Menunggu anggaran kas
			Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Belum ada Surat permintaan pelayanan Pencatatan Sipil	akan menjadwal untuk segera melaksanakan pelayanan dengan inisiatif dinas
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Buku profil kependudukan dan buku Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2019 dalam tahap penyusunan buku	Anggaran kas sudah siap
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating & pemeliharaan)	Belum ada kerusakan yang serius	Beberapa alat sudah ada yang diperbaiki, untuk pembayaran menunggu anggaran kas

BAB IV

PENUTUP

4.1 SARAN DAN MASUKAN

1. Bappeda Kobar melalui bidang teknis perlu melakukan inisiasi, fasilitasi, koordinasi, dan supervisi secara lebih intensif dengan berbagai pihak/instansi terkait sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari DAK;
2. Pemkab Kobar melalui SKPD terkait perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat fungsi pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan APBD/APBN;
3. Bappeda Kobar melalui bidang teknis perlu memperkuat mekanisme pelaporan pelaksanaan DAK dengan mengoptimalkan instrumen SIPORDA/SIMRAL agar mampu menyajikan data real yang lengkap dan valid;
4. Perlu diselenggarakan Rapim Terbatas untuk mengevaluasi progress (kemajuan) pelaksanaan kegiatan dan mempercepat serapan keuangan.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan. Kami sangat berharap saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai sarana perbaikan pencapaian target pembangunan dan peningkatan fungsi pengendalian, evaluasi dan pelaporan DAK pada masa-masa yang akan datang. Atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin selama ini, kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, Juli 2019
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Barat

ttd

Drs. MUHAMMAD FAUZI, M.Si
NIP.19600103 199003 1 004